

IZIN DISERAHKAN KE PEMDA

Baru 15% Sekolah Lakukan PTM

JAKARTA (KR) - Izin pembukaan sekolah untuk pembela-jaran tatap muka dengan protokol kesehatan sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (pemda). Pemerintah pusat sudah membuat sejumlah pedoman pembukaan sekolah di masa pandemi dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang harus jadi acuan pemerintah daerah.

"Jadi bukan ke Kem-dikbud, tapi sepenuhnya diserahkan ke pemerintah daerah" ujar Mendikbud Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja dengan Ko-misi X DPR, baru-baru ini. "Pembukaan sekolah itu adalah prerogatifnya pem-da sejak Januari 2021.

Saya sudah berulang kali menjelaskan ini. Dari awal tahun ini semua sekolah boleh melaksanakan tatap muka terbatas dengan pro-tokol kesehatan," kata Mendikbud . Oleh karena itu, pemda wajib memberikan opsi pembukaan sekolah kepada

para murid dan orangtua-nya jika seluruh guru-guru di daerah tersebut sudah di-vaksin. Dalam catatan Kemendikbud, hingga saat ini baru 15 persen sekolah di Indonesia yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka dengan pro-tokol kesehatan Covid-19.

Kondisi ini menurut Nadiem, tidak boleh ber-langsung lama sebab anak-anak sudah banyak keting-galan pelajaran dan de-ngan program vaksinasi bagi guru dan tenaga pen-didik diharapkan sekolah bisa dibuka kembali.

Selain itu, sekolah dari rumah dinilai menim-bulkan berbagai masalah rumah tangga yang kom-pleks, seperti putus seko-lah, kekerasan anak, pe-kerjaan orangtua ter-abaiakan karena mendam-pingi anak PJJ, hingga pernikahan dini. **(Ati)-d**

PANDEMI TAK SURUTKAN SEMANGAT

SMAN 6 Adakan Kemah Soedikar Virtual

YOGYA (KR) - Pandemi Covid-19 ti-dak menyurutkan niat Dewan Ambalan Jenderal Soedirman dan RA Kartini (Soedikar) SMA Negeri 6 Yogyakarta un-tuk menyelenggarakan kemah. Kemah dikemas secara virtual dengan tema 'Membangun Wawasan Kepedulian Lingkungan Melalui Kegiatan Kepra-mukaan'.

"Seluruh peserta mengikuti kegiatan dari rumah masing-masing, sedangkan beberapa panitia bertugas di sekolah saat upacara pembukaan dan penutupan. Kemah Soedikar Virtual Adiwiyata yang kemudian disingkat dengan Kesatria di-selenggarakan untuk membangun soli-daritas dan kekeluargaan antaranggota pramuka dengan tetap berawasan ling-kungan serta meningkatkan dan melatih keterampilan kepramukaan," kata Ke-

pala SMAN 6 Yogyakarta sekaligus Ka-mabigus Siti Hajarwati MPdSi di Yogya-karta, Senin (22/3).

Hajarwati, sangat mendukung dan me-nyambut baik kegiatan tersebut. Karena selain bisa mensukseskan kegiatan pra-muka, juga mendukung program sekolah tahun ini yang tengah menuju sekolah adiwiyata mandiri.

"Agenda kegiatan tidak kalah serunya dengan kemah tatap muka dengan ada-nya giat umum, giat prestasi dan giat bakti. Dalam Giat Umum ada upacara pem-bukaan dan penutupan, webinar materi adiwiyata era baru dengan pemateri dari Dinas Lingkungan Hidup kota Yogya-karta dan webinar *leadership at pan-demic* pemateri dari Dewan Kerja Daerah Kota Yogyakarta,serta kegiatan apel pagi dan olahraga," terangnya. **(Ria)-d**

Sistem Sambungan hal 1

Setelah selama ini diperkenalkan seko-lah standar nasional (SSN) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), saat ini kita berkenalan dengan sekolah penggerak (SP). Sebagaimana SSN dan RSBI, SP adalah label elitis satuan pendidikan yang tidak mungkin disan-dang setiap sekolah. Bukan hanya elitisme sekolahnya, personel-personel yang terlibat pun akan menjadi elite-elite baru dalam bidang pendidikan dan persekolahan.

Pelatih ahli, pendamping, kepala se-kolah, dan guru penggerak yang lolos seleksi rekrutmen akan menjadi kumpu-lan kecil orang yang memperoleh privi-lese melalui sekolah penggerak. Ke-banggaan yang tiada terkira. Dari sisi kelembagaan, sekolah penggerak yang lolos seleksi selain memperoleh label baru yang mentereng juga mendapat berbagai manfaat. Antara lain pendam-pingan pengembangan guru dan kepala sekolah oleh pelatih ahli, pengemban-gan pembelajaran, perencanaan berbas-is data, dan digitalisasi sekolah.

Sebagaimana pelaksanaan logika pro-gram pada umumnya, sekolah-sekolah terpilih akan mendapatkan prioritas inter-vensi pertama dan utama. Persoal-

annya, sekelompok kecil sekolah peng-gerak didampingi serius dengan anggar-an biaya yang tidak sedikit, sedang sekelompok besar sekolah tanpa inter-vensi apapun dalam upaya melakukan transformasinya. Dalam konteks ini telah terjadi ketidakadilan. Bukan tidak mung-kin yang lolos seleksi sebagai sekolah penggerak adalah sekolah-sekolah yang sudah mapan dan dikelola dengan baik.

Umumnya sekolah yang sudah map-an dan dikelola dengan baik dipimpin kepala sekolah yang memiliki kemam-puan manajerial tangguh. Antara lain memiliki misi kuat, mampu mengambil keputusan strategis, mampu memimpin perubahan, memiliki kemampuan me-laksanakan pelatihan dan pembimb-ingan, mampu membangun kerja sama, dan memiliki orientasi sebagai pemela-jar. Selain itu juga memiliki daya juang, kematangan etika, memimpin imple-mentasi dan mendorong inovasi. Jika hal-hal yang demikian ini yang dijadikan kriteria seleksi kepala sekolah pengger-ak, tidaklah mungkin kepala sekolah dari sekolah biasa akan dapat terjaring.

Agar sekolah biasa memperoleh peluang dan mengambil manfaat seko-lah penggerak, diperlukan pemetaan

sekolah secara konprehensif. Di Indo-nesia terdapat 52 juta siswa dan 3,3 juta guru. Tidak kurang 2,3 juta tenaga ke-pendidikan dan 400 ribu satuan pen-didikan yang membutuhkan intervensi pemerintah secara adil. Setiap satuan pendidikan memiliki data dasar hasil akreditasi, ujian nasional, uji kompetensi guru, dan pemetaan mutu pendidikan lainnya. Data ini sebenarnya meru-pakan alat yang cukup untuk menen-tukan sekolah yang membutuhkan inter-vensi.

Mengintervensi sekolah yang sudah baik melalui sekolah penggerak bisa ja-di ada manfaatnya. Tetapi membiarkan tidak berdaya sekolah yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan pemerin-tah merupakan bentuk ketidakadilan yang mencerminkan kegagalan Men-dikbud memahami membangun dan menguatkan sistem pendidikan nasio-nal berkelanjutan. Sekolah penggerak bukan hanya untuk sekolah yang sudah baik. Tetapi untuk sekolah yang mem-butuhkan uluran tangan intervensi pe-merintah dalam melakukan transfor-masinya.

(Penulis adalah Dewan Pakar Pengurus Daerah PGRI DIY)-d

KPK Sambungan hal 1

(PNS/Kementerian Keuangan/Pelaksa-na pada Politeknik Keuangan Negara STAN)," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan-nya, di Jakarta, Senin (22/3).

Ali mengatakan pemeriksaan terha-dap saksi tersebut digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap di Ditjen Pajak. De-ngan penyidikan itu, KPK telah mene-

tapkan tersangka. Adapun nilai suap yang terjadi mencapai sekitar puluhan miliar rupiah. Adapun pengumuman ter-sangka akan disampaikan saat tim pe-nyidik KPK telah melakukan upaya pak-sa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan.

KPK juga telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah ke luar nege-ri terhadap dua pejabat Ditjen Pajak

yang diduga terlibat suap, yaitu berinisial APA dan DR. Empat orang lainnya juga dicegah terkait kasus tersebut, yaitu RAR, AIM, VL, dan AS. Pencegahan berlaku selama enam bulan terhitung 8 Februari hingga 5 Agustus 2021.

KPK pada Kamis (18/3), juga meng-amankan dokumen dan barang elek-tronik serta pengeledahan di beberapa lokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kali-mantan Selatan. **(Ant)-d**

Penguasaan Sambungan hal 1

Walaupun dalam realitanya untuk me-wujudkan hal itu tidak mudah, karena dewasa ini aksara Jawa harus berta-han dengan bersusah payah yang didominasi aksara latin.

"Perkembangan teknologi informasi yang pesat pun, secara umum meng-ukuhkan dominasi tersebut sehing-ga menyudutkan aksara Jawa. Ini ter-lihat dari penggunaan aksara latin di sebagian platform aplikasi.

Untuk itu pelestarian aksara Jawa harus dipandang sebagai langkah yang mutlak dan harus dipertahankan guna menjaga keberlangsungan ke-budayaan Jawa," kata Menteri Pen-didikan dan Kebudayaan (Mendik-bud) Nadiem Makarim saat member-ikan sambutan dalam Kongres Aksara Jawa 1 secara daring di Yogyakarta, Senin (22/3).

Nadiem Makarim mengatakan, ma-syarakat Jawa kini cenderung mema-kai bahasa Indonesia sebagai per-

cakapan sehari-hari yang akhirnya membuat aksara Jawa kian diting-galkan oleh penuturnya. Adanya fe-nomena tersebut menjadi tantangan bersama agar kelestarian aksara Ja-wa bisa selalu terjaga. Karena me-lestarikan aksara Jawa berarti mer-awat tubuh kebudayaan Jawa serta mendorong penciptaan aneka bentuk ekspresi yang akan semakin mem-perkaya kebudayaan Bangsa Indo-nesia. Lebih dari sekadar memper-kuat budaya bangsa, Bahasa Jawa merupakan bagian penting dalam pendidikan budi pekerti sehingga eks-istensi penggunaan aksaranya har-us tetap dijaga.

"Ke depan, kita harus mendorong kebudayaan Jawa yang semakin inklusif dan mendukung kedudukan aksara Jawa di tengah ekosistem ke-bahasaan dunia. Selain itu karakter seseorang dapat dinilai dari kehalu-san perilaku, cara bicara dan pera-

saan. Oleh karena itu penguasaan bahasa, khususnya bahasa daerah lebih dari sekedar alat komunikasi, tapi juga berhubungan erat dengan pembangunan budi pekerti," terang Mendikbud.

Menurut Mendikbud, konservasi budaya lokal dengan memanfaatkan teknologi digital merupakan strategi kemajuan dan pengarusutamaan yang harus dilakukan oleh Kemendik-bud. Dengan memanfaatkan tekno-logi digital, budaya lokal akan mampu mendapatkan pengakuan di tengah situasi global yang menuntut moderni-tas. Oleh karena itu menyambut baik kongres aksara Jawa 1 yang diada-kan di Yogyakarta. "Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan literasi, paradig-ma pendidikan budaya dan falsafah lokal," ujarnya

Pakar Sastra Jawa dari UNY Dr Drs

Sambungan hal 1

Afendy Widayat M Phil menuturkan Kongres aksara Jawa adalah tonggak dari tahapan-tahapan sebelumnya yang sangat membanggakan, bukan hanya bagi bangsa Jawa tetapi bang-sa Indonesia pada umumnya. Hal ini karena, bagaimanapun budaya Indo-nesia belum ada dan yang ada ada-lah budaya-budaya daerah di Indo-nesia. Budaya yang diakui sebagai budaya Indonesia saat ini dan men-datang ditopang dilengkapi oleh bu-daya Jawa.

"Aksara Jawa adalah wadah bu-daya Jawa yang layak menjadi ke-banggaan bangsa Indonesia saat ini dan mendatang. Kongres aksara Ja-wa akan menjadi tonggak kembalinya kebanggaan jati diri bangsa Indone-sia. Melalui reaktualisasi aksara Ja-wa, maka berbagai hasil budaya ma-sa lalu akan dibanggakan lagi regi-nerasi bangsa Indonesia," jelasnya. **(Ria/Ira)-d**

Pemerintah ... Sambungan hal 1

Salah satu syarat perjalanan yang harus dipatuhi masyara-kat saat mudik ialah dengan menunjukkan hasil tes Covid-19 dengan masa berlaku lebih singkat dari sebelumnya.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan ketentuan terkait libur dan mudik Lebaran 2021 akan diputuskan pemerintah se-belum bulan Ramadan. "Soal mudik Lebaran itu belum kami putuskan, nanti saya kira tidak lama lagi, menjelang puasa itu nanti akan ada keputusan," kata Wapres Ma'ruf Amin,

Pemerintah akan tegas melarang masyarakat untuk mudik Lebaran apabila hal itu berdampak pada penularan dan pe-ningkatan angka kasus Covid-19 di Indonesia. **(Sim)-d**

110.459 Sambungan hal 1

"Pendaftar total, yang terdiri dari siswa eligible (memenuhi syarat) dan sudah finalisasi, sebanyak 595.093 siswa yang berasal dari 17.436 sekolah yang telah melakukan finalisasi di seluruh Indonesia, termasuk sekolah di luar negeri," ujar Nasih.

Hasil SNMPTN 2021 diumumkan pada Senin mulai pukul 15.00 WIB di laman resmi LTMP. Peserta seleksi bisa meng-akses pengumuman dengan memasukkan nomor pendaf-taran SNMPTN 2021 dan tanggal lahir sesuai dengan data diri yang telah terdaftar di sistem LTMP. **(Ati)-d**



KR-Franz Boedisukarnanto

Suasana Kongres Aksara Jawa di Hotel Mercure, Yogyakarta.

kait, terutama setelah dilo-laknya aksara Jawa untuk mendapatkan domain inter-nasional. Eksistensi aksara Jawa harus bercemin sudah berada di tingkatan mana da-lam masa sekarang ini. "Saya tidak ingin mengu-raikan betapa adiluhungnya aksara Jawa sebagai wa-risan kebudayaan di tanah Jawa dan tanah air. Tetapi keyakinan soal keadilu-hungan tersebut tidaklah cu-kup dan akan *muspra* jika warisan kebudayaan itu tidak bisa *ngrembaka* atau ber-kembang," ujarnya.

Ganjar berharap kongres ini akan mengeluarkan rumu-san yang tepat sebagai peta penunjuk jalan antara pakar, aktivis serta pemerintah agar aksara Jawa semakin ber-kembang. Sebagai contoh, Pemprov Jateng tidak hanya

mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) agar aksara Jawa tetap eksis. Kongres Aksara Jawa ini di-harapkan pula menjadi mile-stone guna menggairahkan kembali dan menjaga eksis-tensi kebudayaan bangsa ini. "Guru bahasa Jawa akan menjadi garda terdepan se-bagai pemegang kendali penguasaan dan penyebar-luasan, aktivis menjadi polisi penegak peraturan dan pe-meriksa keadaan, semen-tara pakar menempati ruang semedi yang akan menelur-kan penelitian dan pengem-bangan aksara Jawa. Saya menantikan gagasan cemer-lang kongres ini, yang jelas DIY, Jateng dan Jawa Timur akan selalu melengkapi lang-kah agar kita tidak kehilangan Jawa-nya," pungkasnya. **(Ria/Ira)-d**



Ferri Wicaksono, SIP., MA.
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas AMIKOM Yogyakarta

DILANTIKNYA Nadiem Anwar Makarim atau akrab disapa Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Era Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2019 lalu, langsung memunculkan gebrakan baru dengan program 'merdeka belajar'.

Program tersebut diwacanakan sebagai suatu program 'membaha-giakan'bagi akademisi utamanya para murid dan tenaga pendidik. Saat ini program'merdeka belajar'

Quadruple Helix pada Konsep Merdeka Belajar

mulai banyak diinternalisasi dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak terkecuali pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi di Indonesia mulai gencar melakukan penyesuaian kurikulum terhadap konsep 'merdeka belajar' ala Nadiem Makarim.

Pemikiran Nadiem Makarim mendasari bahwa nilai akademik tidak lagi dapat menjadi indikator utama atas kompetensi seseorang. Sehingga perlu untuk lembaga penyelenggara pendidikan member-ikan opsi lain bagi para peserta didiknya dalam mengapresiasi kompetensinya. Apresiasi yang diberikan, sebagaimana tersurat dalam Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yakni perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa secara sukarela dapat mengambil SKS

di luar perguruan tinggi. Kegiatan luar perguruan tinggi tersebut dapat diwujudkan melalui

berbagai jenis, yakni belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil, yang selanjutnya akan disetarakan dengan bobot SKS.

Implementasi program tersebut tentunya tidak bisa hanya mengan-dalkan inovasi yang dilakukan perguruan tinggi. Perlu peran stakeholder lain untuk menge-ktifikan berjalannya program tersebut. Setidaknya terdapat empat aktor yang perlu diintegrasikan dalam sebuah sistem 'merdeka belajar', yakni pemerintah, industri, komunitas, dan perguruan tinggi, atau diistilahkan dengan quadruple helix. Pertama, Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan dan program sektor publik, perlu menginternalisasi lebih luas dalam cakupan lembaga penyelenggara layanan public lainnya berkaitan

dengan program 'merdeka belajar'. Tentunya perlu diintegrasikan dengan program lain yang berada dalam tanggung jawab kementerian maupun lembaga lain diluar Kemendikbud. Semangat pemerintah dibalik program 'merdeka belajar' dalam memberikan ruang peserta didik terkait pengembangan kompe-tensinya pra kelulusan, perlu dikorelasikan dengan program dari misalnya Kementerian Keten-a-garakerjaan dengan mewajibkan bagi perusahaan/industri untuk menerima peserta magang mahasiswa.

Selain itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi misalnya dapat juga mengintegrasikan program pembangunan desa dengan membuka ruang perguruan tinggi turut serta mengirim mahasiswanya maupun tenaga pendidik untuk dioptimalkan sebagai sumber daya

penggerak desa. Kedua, Industri, sebagaimana diketahui bahwa peserta didik menempuh pendidikan formal dan memperoleh ijazah, harapannya pasca lulus dapat diterima di dunia industri. Kendala yang sering dialami oleh kedua pihak yakni ketidakselarasan memperoleh kompetensi sesuai dengan trend kebutuhan industri. Ketiga, Komunitas, dalam hal ini masyarakat sebagai sebuah komunitas perlu membuka ruang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian.

Program-program berbasis komunitas seperti anti korupsi, peduli lingkungan, bebas buta huruf, dan sejenisnya dapat menjadi ajang para akademisi termasuk mahasiswa untuk menjalankan proyek-proyek kemanusiaan. Dimana sentuhan pembelajaran dari komunitas, sama halnya dengan industri, mampu memberikan kompetensi praktis bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan



pemahaman teoritis dari perguruan tinggi. Keempat, Perguruan Tinggi, sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya layak untuk menginternalisasi peran industri dan komunitas tersebut dalam rancangan kurikulum. Sehingga aplikasi teori di bangku perkuliahan tidak lagi hanya sebatas sebuah dokumen script semacam paper tugas konseptual dan sejenisnya, namun bisa diperluas dalam berbagai produk/karya lain dari hasil kegiatan mahasiswa diluar perguruan tinggi. Perguruan tinggi kedepan perlu dimampukan untuk tidak sebatas menghasilkan lulusan berijazah, namun perlu ditekankan pada menghasilkan lulusan berkompetensi. Demikian harapan penulis penerapan model quadruple helix dalam implementasi 'merdeka belajar' dapat benar-benar memberikan 'kebahagiaan' bagi akademisi. (*)